

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elijana, *Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pembersihan Boedel Pailit, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Prosiding*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Hartini, Rahayu, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, 2006.
- Hoff, Jerry, *Indonesian Bankruptcy Law*, Terj. Kartini Muljadi, Jakarta : PT. Tatanusa, 2000.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, (Jakarta: Artikel pada jurnal Hukum Bisnis Volume 7 Tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Judisseno, Rimsky K., *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lontoh, Rudy A., Denny Kailimang, dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni, 2001.
- Purwaka, Tommy Hendra, *Kerangka Pemahaman Politik Hukum Nasional Aspek Teoritikal*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Cet Ke-2, Yogyakarta : Laksbang PRESSindo, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2012.

Shubhan, M Hadi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2008.

Satrawidjaja, Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni, 2006.

Sjahdeni, Sutan Remy, *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Cet Ke-1, Bandung : Alumni, 1999.

_____, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.

_____, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafik.

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Pratik di Peradilan*, Cetakan ke -4, Prenadamedia Group.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2013.

Manik, Edward, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Mandar Maju, 2012.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Mertokusumo, Sudikno, dan A.Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

Hartanto, J. Andy, *Hukum Jaminan dan Kepailitan Hak KReditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, Cetakan Pertama, Surabaya : LaksBang Justitia Surabaya, 2015.

Widijowati, Dijan, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: CV ANDI, 2012.

Weng, Lee A, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv (Faillissement – Verordening) S.1905 No. 217 Jo S.1906 No. 348 Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Medan : Tandra Law Office, 2001.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, *Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/ UU Agraria.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia/ UU Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kamus

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.

Erawati, A.F Elly dan J.S Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta: ELIPS, 1997.

Garner, Bryan A., ed., *Black's Law Dictionary, Seventh Edition, Book 1*, ST. Paul, Minn : West Group, 1999.

Internet

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/litigasi/Putusan%20PUU%2018-2008%20Kepailitan-%20Dirjen.pdf>, diakses pada tanggal 21 Januari 2017, pukul 12.10 WIB.

Irwan Aribowo:

<http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19557-kreditur-preferen-dalam-pajak,-apakah-sama-dalam-versi-kepailitan> diakses pada tanggal 21 Januari 2017, pukul 12.10 WIB.